

Faktor Penentu Keberhasilan Proyek KPBu Penerangan Jalan Umum: Studi Komparatif antara Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung

Deny Kurniawan¹, Firwan Tan², Zulkifli N³

¹Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

^{2,3}Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

denykurniawan812@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the critical success factors of Public-Private Partnership projects in the provision of Public Street Lighting infrastructure through a comparative case study in Dharmasraya and Sijunjung Regencies, West Sumatra Province. The research method employed is causal-comparative with a quantitative approach, utilizing questionnaires, interviews, and documentation involving stakeholders in the PPP projects. Data analysis was conducted using a paired t-test to examine differences in perceptions between the two regencies across 18 success factor variables. The results show that Dharmasraya Regency demonstrated a higher level of success in implementing the PPP PJU project compared to Sijunjung, particularly in aspects such as government commitment, political support, accountability, delegation of authority, and public support. Meanwhile, several factors such as lighting efficiency, clarity of cooperation agreements, and project feasibility did not show significant differences between the regions. These findings highlight the importance of institutional, social, and political support in ensuring the success of PPP projects at the local level. The study recommends enhancing the capacity of PPP project teams and strengthening budgetary commitments in each region as strategic steps to improve the effectiveness of similar future projects.

.Keywords: KPBu, Public Street Lighting, Success Factors, Comparative Study, Dharmasraya, Sijunjung.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum dengan studi kasus komparatif di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kausal komparatif dengan pendekatan kuantitatif, menggunakan instrumen kuesioner, wawancara, dan dokumentasi terhadap para pemangku kepentingan proyek KPBu. Analisis data dilakukan dengan uji paired t-test untuk menguji perbedaan persepsi antar dua kabupaten terhadap 18 variabel faktor keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki tingkat keberhasilan implementasi proyek KPBu PJU yang lebih tinggi dibandingkan Sijunjung, terutama dalam aspek komitmen pemerintah daerah, dukungan politik, akuntabilitas, pelimpahan wewenang, dan dukungan publik. Sementara itu, beberapa faktor seperti efisiensi lampu, bentuk perjanjian kerja sama, dan kelayakan proyek tidak menunjukkan perbedaan signifikan antar wilayah. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan, sosial, dan politik dalam menunjang keberhasilan KPBu di tingkat lokal. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas tim KPBu dan penguatan komitmen anggaran di masing-masing daerah sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas proyek sejenis di masa depan.

Kata kunci: KPBu, Penerangan Jalan Umum, Faktor Keberhasilan, Studi Komparatif, Dharmasraya, Sijunjung.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, terutama dalam upaya meningkatkan konektivitas dan kualitas layanan publik di berbagai daerah. Infrastruktur yang andal diyakini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk penyediaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sangat vital bagi keamanan, kenyamanan, dan aktivitas ekonomi malam hari. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah

mengembangkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBu) sebagai alternatif pembiayaan yang melibatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik secara berkelanjutan [1][2].

Skema KPBu dianggap mampu mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa harus membebani keuangan negara secara langsung, sekaligus meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Secara khusus, proyek PJU melalui skema KPBu menjadi menarik karena dapat mengintegrasikan teknologi lampu hemat energi, sistem pemeliharaan berbasis kinerja, serta sistem pembayaran berbasis layanan (*availability payment*), yang semuanya didesain untuk menjamin

keberlanjutan dan akuntabilitas proyek di jangka panjang. Dalam implementasinya, skema KPBU untuk proyek PJU umumnya dilakukan melalui mekanisme unsolicited proposal, di mana inisiatif berasal dari pihak swasta yang kemudian dinilai kelayakannya oleh pemerintah [3].

Dua kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, telah mengajukan proyek KPBU untuk pembangunan dan pengelolaan PJU. Meskipun kedua daerah memiliki kondisi geografis dan sosial ekonomi yang relatif serupa termasuk tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, dan kapasitas fiskal daerah hasil implementasi proyek menunjukkan perbedaan signifikan. Proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya berhasil mencapai tahap penandatanganan kontrak dan kini telah beroperasi, memberikan layanan pencahayaan jalan di puluhan kilometer ruas jalan utama dengan sistem manajemen modern [4].

Sebaliknya, proyek serupa di Kabupaten Sijunjung belum mampu melampaui tahap pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) sejak 2022, dan hingga saat ini belum menunjukkan progres berarti dalam realisasi fisik maupun kontraktual. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai faktor-faktor apa yang menentukan keberhasilan suatu proyek KPBU, khususnya dalam konteks kabupaten dengan kemiripan struktural. Apakah keberhasilan lebih ditentukan oleh faktor teknis dan kelayakan proyek semata, atau ada faktor-faktor kelembagaan dan kepemimpinan daerah yang berperan lebih besar?

Dalam konteks ini, penelitian mengenai Critical Success Factors (CSF) menjadi sangat relevan. CSF merujuk pada elemen-elemen penting yang harus dipenuhi agar sebuah proyek KPBU dapat berhasil secara teknis, finansial, dan kelembagaan. Beberapa studi sebelumnya mengidentifikasi bahwa keberhasilan proyek KPBU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti dukungan politik dari kepala daerah, kapasitas kelembagaan dan birokrasi pengelola proyek, kejelasan kerangka regulasi, kualitas dokumen studi kelayakan, kemampuan mitigasi risiko, hingga keterlibatan pemangku kepentingan sejak awal [3][5].

Selain itu, keberhasilan KPBU juga sering dikaitkan dengan adanya komitmen jangka panjang dari pemerintah daerah, kompetensi tim pelaksana proyek, dan fleksibilitas desain proyek dalam menghadapi dinamika lokal. Oleh karena itu, studi komparatif antara Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung penting untuk mengidentifikasi variabel kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan proyek KPBU PJU. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam literatur KPBU di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan strategi implementasi proyek KPBU yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Ekonomi publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas melalui kebijakan alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut [6], fungsi utama ekonomi publik adalah menyediakan barang dan jasa publik, menjamin keadilan distribusi pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro. Menurut [7] kebijakan fiskal, subsidi, dan penyediaan infrastruktur merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penyediaan infrastruktur penerangan jalan umum (PJU), peran ekonomi publik sangat penting sebagai bagian dari fungsi alokasi pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang bersifat non-eksklusif dan non-rival, sebagaimana dijelaskan oleh [8] dalam teori barang publik. PJU memenuhi karakteristik barang publik karena manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa mengurangi ketersediaannya untuk orang lain.

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu inovasi dalam pengelolaan infrastruktur publik yang menggabungkan peran pemerintah dan sektor swasta. Model KPBU di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 yang menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut [9] KPBU atau public-private partnership (PPP) adalah mekanisme pembagian risiko dan tanggung jawab secara formal antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan layanan publik. Dalam pelaksanaan KPBU, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda, sebagaimana dijelaskan dalam teori pilihan publik (*Public Choice Theory*) oleh [10]. Teori ini menyoroti bahwa keputusan kebijakan publik tidak selalu semata-mata mewakili kepentingan umum melainkan hasil negosiasi dan kompromi antara aktor-aktor yang terlibat [11].

Selain itu, teori pilihan sosial (*Social Choice Theory*) yang dikembangkan oleh [12] menunjukkan bahwa menggabungkan preferensi individu menjadi keputusan kolektif yang konsisten merupakan tantangan tersendiri, sehingga konsultasi publik dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam memperoleh legitimasi sosial terhadap proyek KPBU, khususnya dalam sektor PJU. Di sisi kelembagaan, menurut [13] keberhasilan proyek infrastruktur sangat bergantung pada regulasi dan institusi yang mendukung, sehingga Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 menjadi landasan hukum yang krusial untuk pelaksanaan KPBU di Indonesia.

Keberhasilan pelaksanaan KPBU juga sangat bergantung pada faktor-faktor kritis yang dikenal sebagai Critical Success Factors (CSF). Menurut [14] CSF sebagai area utama yang harus berhasil dicapai agar sebuah proyek dapat berjalan sesuai tujuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh [15], ditemukan bahwa faktor seperti kepastian hukum, pembagian risiko yang adil, keterlibatan stakeholder, dan

mekanisme pengawasan yang efektif merupakan kunci sukses dalam implementasi KPBUs. Oleh karena itu, identifikasi dan manajemen CSF menjadi hal yang sangat penting agar proyek KPBUs PJU dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penerangan jalan umum sebagai bagian dari infrastruktur ekonomi dan sosial mempunyai peran strategis dalam meningkatkan keselamatan dan kenyamanan publik di malam hari. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 27 Tahun 2018, penggunaan teknologi hemat energi dalam APJ juga merupakan bagian dari upaya efisiensi dan keberlanjutan dalam penyediaan layanan publik. Melalui KPBUs, pemerintah dapat mengoptimalkan keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan PJU, sehingga tekanan terhadap anggaran daerah dapat diminimalkan dan kualitas layanan dapat ditingkatkan [16].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kausal komparatif, yang merupakan penyelidikan empiris sistematis dimana peneliti tidak mengontrol variabel bebas secara langsung karena variabel tersebut telah terjadi atau tidak dapat dimanipulasi [17]. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan fokus pada perbandingan variabel antar kelompok. Metode penelitian komparatif bertujuan membandingkan nilai variabel independen antara dua atau lebih populasi atau sampel serta memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada penelitian deskriptif [18]. Penelitian komparatif berusaha menguji hubungan sebab-akibat dengan menganalisis komponen penyebab fenomena tertentu, yang dalam konteks ini lebih mengarah pada pengujian perbedaan antar kelompok [19]. Penelitian ini membandingkan dua lokasi, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung, yang dipilih berdasarkan relevansi karakteristik dan data yang memadai untuk pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama periode Desember 2024 hingga Februari 2025.

Populasi penelitian ini adalah seluruh subjek yang terlibat dalam proyek KPBUs infrastruktur penerangan jalan umum (PJU) di kedua kabupaten tersebut, sedangkan sampel diambil secara proporsional dari tim KPBUs yang terkait [18][20]. Data primer digunakan sebagai sumber utama, diperoleh melalui kuesioner dan wawancara semi-terstruktur yang bertujuan memperoleh informasi aktual dan mendalam mengenai faktor penentu keberhasilan proyek KPBUs PJU. Kuesioner disusun dalam format tertutup dan terbuka, dengan responden meliputi tim KPBUs, staf dinas terkait, anggota DPRD, konsultan, dan pihak ketiga, sedangkan wawancara dilakukan kepada informan kunci secara purposif untuk memperkaya analisis [21][22].

Teknik pengumpulan data mencakup observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, kuesioner, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara

langsung oleh peneliti sebagai bagian dari tim KPBUs, sesuai definisi observasi yang menekankan pengamatan langsung objek penelitian dalam situasi sebenarnya [18]. Wawancara bertujuan menggali informasi kualitatif secara mendalam, dilakukan dengan metode semi-terstruktur yang memungkinkan informan menjelaskan jawaban secara bebas [23]. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dengan skala Likert 1-5, disusun berdasarkan indikator variabel faktor keberhasilan KPBUs PJU yang sebagian besar diadopsi dari penelitian terdahulu [24]. Studi dokumentasi mendukung dengan menelaah dokumen resmi terkait pembentukan tim KPBUs dan evaluasi studi kelayakan proyek, sebagaimana dijelaskan tentang pentingnya dokumentasi dalam memperoleh data historis dan administratif.

Variabel penelitian diklasifikasikan menjadi variabel independen (faktor penentu keberhasilan KPBUs PJU) dan dependen yang merupakan hasil atau efek yang diukur. Variabel moderator dan mediator juga diperhatikan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Penggunaan variabel kontrol bertujuan memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen, bukan oleh faktor lain yang tidak diinginkan. Faktor penentu keberhasilan yang dianalisis berdasarkan penelitian terdahulu dan disesuaikan dengan kondisi lapangan ini sangat krusial dalam mengevaluasi keberhasilan KPBUs PJU.

Analisis data menggunakan uji t independen (independent sample t-test) untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak saling berhubungan, yakni Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung. Uji t dipilih karena data yang dianalisis berskala interval/rasio dengan distribusi normal dan bertujuan menguji signifikansi perbedaan antar kelompok. Sebelum pengujian, persyaratan seperti normalitas data dan homogenitas varians diuji untuk memastikan validitas uji t. Rumus uji t yang digunakan dipilih berdasarkan kesamaan jumlah sampel dan homogenitas varians antara kelompok yang diuji.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil uji beda faktor penentu keberhasilan Proyek KPBUs infrastruktur PJU antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Sijunjung yang dikemas dalam bentuk bentuk pertanyaan kuesioner: Komitmen Pemerintah Daerah (Menurut Bapak/Ibu, bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam penyediaan anggaran dan dokumen RPJMD/perencanaan terkait dengan KPBUs PJU di Daerah Bapak/ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test Komitmen Pemerintah daerah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Paired t-test Komitmen Pemerintah Daerah

Variable	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Conf. Interval	P-Value	Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x1d	30	4.066	0.135	0.739	[3.790, 4.342]		x3d	29	3.8965	0.10	0.557	[3.684648, 4.108456]	
x1s	30	3.033	0.176	0.964	[2.673, 3.393]		x3s	29	3.6551	0.15	0.813	[3.345551, 3.964793]	
diff	30	1.033	0.246	1.351	[0.528, 1.537]	0.0002	diff	29	0.2413	0.15	0.830	[-0.0745088, 0.5572674]	0.12

Hasil uji paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam komitmen pemerintah daerah antara Dharmasraya dan Sijunjung terkait penyediaan anggaran dan dokumen RPJMD untuk KPBUs PJU. Rata-rata penilaian Dharmasraya adalah 4,07 dan Sijunjung 3,03, dengan selisih mean 1,03 dan p-value 0,0002 (<0,05), yang mengindikasikan signifikansi statistik. Hal ini menunjukkan bahwa Dharmasraya dinilai memiliki komitmen yang lebih tinggi dibandingkan Sijunjung dalam mendukung pelaksanaan KPBUs, baik dari segi penganggaran maupun perencanaan pembangunan daerah. Lingkungan Politik (Bagaimana menurut Bapak/Ibu kondisi politik antara lembaga eksekutif (Bupati/Pemerintah Daerah) dengan lembaga legislatif (DPRD) pada saat proses perencanaan dan negosiasi pelaksanaan KPBUs PJU di Daerah Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test Lingkungan Politik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Paired t-test Lingkungan Politik

Variabel	n	Mean	Std. Err	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x2d	30	4.3333	0.12	0.71	[4.067782, 4.598884]	
x2s	30	3.4333	0.15	0.85	[3.112817, 3.75385]	
diff	30	0.9	0.19	1.09	[0.4915422, 1.308458]	0.0001

Hasil uji paired t-test menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap hubungan politik antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan serta negosiasi KPBUs PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian Dharmasraya sebesar 4,33 lebih tinggi dibandingkan Sijunjung sebesar 3,43, dengan selisih mean 0,9 dan p-value 0,0001 (<0,05), yang mengindikasikan signifikansi statistik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi politik antara eksekutif dan legislatif di Dharmasraya dinilai lebih kondusif dan harmonis dibandingkan Sijunjung dalam konteks pelaksanaan KPBUs PJU. Pemerintahan yang baik (Bagaimana menurut Bapak/Ibu, apakah pada saat proses perencanaan serta persiapan dan transaksi KPBUs pemerintah daerah Bapak/Ibu telah menerapkan pemerintahan yang baik/good governance?). Selanjutnya hasil paired t-test pemerintahan yang baik disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Paired t-test Pemerintahan yang Baik

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x3d	29	3.8965	0.10	0.557	[3.684648, 4.108456]	
x3s	29	3.6551	0.15	0.813	[3.345551, 3.964793]	
diff	29	0.2413	0.15	0.830	[-0.0745088, 0.5572674]	0.12

Hasil uji paired t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap penerapan good governance dalam proses perencanaan, persiapan, dan transaksi KPBUs antara pemerintah daerah Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian untuk Dharmasraya adalah 3,90 dan untuk Sijunjung 3,66, dengan selisih rata-rata 0,24 dan interval kepercayaan yang mencakup nol (-0,07 hingga 0,56). Nilai t sebesar 1,5652 dan p-value 0,1288 (> 0,05) mengindikasikan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan good governance pada kedua daerah relatif sama. Peraturan perundang-undangan (Menurut Bapak/Ibu apakah sistem hukum /peraturan perundang-undangan yang diterapkan menguntungkan sebagai faktor penentu keberhasilan?). Selanjutnya hasil paired t-test peraturan perundang-undangan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Paired t-test Peraturan Perundang-undangan

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x4d	30	4.1666	0.10810	0.59209	[3.945575, 4.387758]	
x4s	30	3.5666	0.14128	0.77385	[3.277705, 3.855629]	
diff	30	0.6000	0.18320	1.00344	[0.2253085, 0.9746915]	0.027

Hasil uji paired t-test menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap sistem hukum sebagai faktor penentu keberhasilan KPBUs antara Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian Dharmasraya adalah 4,17 dan Sijunjung 3,57, dengan selisih mean 0,6 dan p-value 0,0027 (<0,05), menunjukkan bahwa perbedaan tersebut signifikan secara statistik. Responden menilai sistem hukum dan regulasi di Dharmasraya lebih mendukung keberhasilan KPBUs dibandingkan dengan Sijunjung. Proses pengadaan yang transparan dan kompetitif (Bagaimana menurut Bapak/Ibu, tingkat transparansi dan persaingan pada proses lelang/pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) KPBUs PJU di Daerah Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test proses pengadaan yang transparan dan kompetitif disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Paired t-test Proses Pengadaan yang Transparan dan Kompetitif

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x5d	3	4.20000	0.138961	0.7611	[3.915791, 4.484209]	0.0
	0	0	7	244		
x5s	3	3.63333	0.176057	0.9643	[3.273256, 3.993411]	0.0
	0	3	3	055		
diff	3	0.56666	0.207244	1.1351	[0.1428045, 0.9905288]	10
	0	7	3	24		5

Hasil uji paired t-test menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap transparansi dan persaingan dalam proses lelang/pengadaan BUP KPBUPJU antara Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian Dharmasraya sebesar 4,2 lebih tinggi dibandingkan Sijunjung sebesar 3,63, dengan selisih mean 0,57 dan p-value 0,0105 (<0,05), menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa proses lelang di Dharmasraya dinilai lebih terbuka dan kompetitif dibandingkan dengan Sijunjung. Persetujuan para pihak untuk pelimpahan wewenang (Menurut bapak/ibu, Seberapa pengaruh pelimpahan wewenang Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJKP) terhadap kesuksesan proyek KPBUPJU?). Selanjutnya hasil paired t-test persetujuan para pihak untuk pelimpahan wewenang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Paired t-test Persetujuan Para Pihak untuk Pelimpahan Wewenang

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x6d	3	4.3333	0.12066	0.660	[4.086551, 4.580115]	0.0
	0	33	23	8946		
x6s	3	3.6666	0.18152	0.994	[3.295413, 4.037921]	0.0
	0	67	19	2363		
diff	3	0.6666	0.18152	0.994	[0.2954127, 1.037921]	01
	0	67	19	2363		0

Hasil uji paired t-test menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap pengaruh studi kelayakan proyek KPBUPJU antara Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian Dharmasraya sebesar 4,27 dan Sijunjung 4,00, dengan selisih mean 0,27 dan p-value 0,1328 (>0,05), menandakan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Responden menilai bahwa studi kelayakan memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap keberhasilan proyek di kedua daerah. Kerangka kerja yang kuat (Menurut bapak/ibu apakah kerangka kerja untuk memantau dan evaluasi proyek KPBUPJU membantu keberhasilan?). Selanjutnya hasil paired t-test kerangka kerja yang kuat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Paired t-test Kerangka Kerja yang Kuat

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x8d	3	4.33333	0.11	0.6064784	[4.106871, 4.559796]	0.4
	0	3	3			
x8s	3	4.20000	0.12	0.6643638	[3.951922, 4.448078]	0.4
	0	0	7			
diff	3	0.13333	0.18	1.008014	[-0.2430652, 0.5097319]	746
	0	3	3			

Hasil uji paired t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi responden terhadap efektivitas kerangka kerja pemantauan dan evaluasi proyek KPBUPJU antara Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian untuk Dharmasraya adalah 4,33 (CI 95%: 4,11–4,56) dan untuk Sijunjung 4,20 (CI 95%: 3,95–4,45), dengan selisih rata-rata 0,13 (CI 95%: -0,24–0,51). Nilai t sebesar 0,7245 dengan p-value 0,4746 (> 0,05) menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemantauan dan evaluasi proyek di kedua daerah dinilai relatif sama dan cukup efektif dalam mendukung keberhasilan KPBUPJU. Kebijakan makro ekonomi dan kondisi perekonomian (Menurut Bapak/ibu pada saat proses persiapan dan transaksi kebijakan makro ekonomi dan kondisi perekonomian yang stabil mempengaruhi keberhasilan proyek KPBUPJU di daerah Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test kebijakan makro ekonomi dan kondisi perekonomian disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Paired t-test Kebijakan Makro Ekonomi dan Kondisi Perekonomian

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x9d	3	4.2333	0.132	0.7279	[3.961519, 4.505148]	0.4
	0	33	9016			
x9s	3	4.0666	0.151	0.8276	[3.757605, 4.375728]	0.4
	0	67	1134			
Diff	3	0.1666	0.220	1.2058	[-0.2835972, 0.6169305]	55
	0	67	1532	29		1

Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap pengaruh kebijakan makroekonomi dan kondisi perekonomian yang stabil terhadap keberhasilan proyek KPBUPJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian untuk Dharmasraya adalah 4,23 (CI 95%: 3,96–4,51) dan untuk Sijunjung 4,07 (CI 95%: 3,76–4,38), dengan selisih rata-rata 0,17 (CI 95%: -0,28–0,62). Nilai t sebesar 0,7570 dan p-value 0,4551 (> 0,05) menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua daerah memiliki persepsi yang relatif sama mengenai pentingnya faktor ekonomi makro dalam mendukung keberhasilan proyek KPBUPJU. Ketersediaan pasar keuangan yang mapan (Menurut bapak/ibu, seberapa besar ketersediaan pasar keuangan yang mapan menunjang keberhasilan KPBUPJU di daerah bapak/ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test

ketersediaan pasar keuangan yang mapan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Paired t-test Ketersediaan Pasar Keuangan yang Mapan

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x10d	3	3.900	0.1466	0.80	[3.600151, 4.199849]	
	0	000	092	3011	6	
x10s	3	3.833	0.1981	1.08	[3.428027, 4.238634]	
	0	333	717	5431		
Diff	3	0.066	0.2193	1.20	[-0.3819926, 0.763]	0.7
	0	667	687	1532	0.5153259]	4

Hasil paired t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi responden mengenai pengaruh ketersediaan pasar keuangan yang mapan terhadap keberhasilan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian untuk Dharmasraya adalah 3,9 (CI 95%: 3,60–4,20) dan untuk Sijunjung 3,83 (CI 95%: 3,43–4,24), dengan selisih rata-rata 0,07 (CI 95%: -0,38–0,52). Nilai t sebesar 0,3039 dan p-value 0,7634 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden memiliki persepsi yang serupa bahwa ketersediaan pasar keuangan yang mapan sama pentingnya dalam mendukung keberhasilan proyek KPBU PJU di kedua daerah. Standar dari akuntabilitas dan transparansi (menurut Bapak/ibu, seberapa bagus akuntabilitas dan transparansi pada pelaksanaan proyek KPBU PJU di daerah bapak?). Selanjutnya hasil paired t-test standar dari akuntabilitas dan transparansi disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Paired t-test Standar dari Akuntabilitas dan Transparansi

Variabel	N	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x11d	30	4.000	0.1356	0.7427	[3.722641, 4.277359]	
	000	127	814			
x11s	30	3.333	0.1464	0.8022	[3.033751, 3.632915]	
	333	785	956			
diff	30	0.666	0.2214	1.2129	[0.2137411, 1.119592]	0.005
	667	546	57			4

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap tingkat akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata penilaian untuk Dharmasraya adalah 4,00 (CI 95%: 3,72–4,28) dan untuk Sijunjung 3,33 (CI 95%: 3,03–3,63), dengan selisih rata-rata 0,67 (CI 95%: 0,21–1,12). Nilai t sebesar 3,0104 dan p-value 0,0054 ($< 0,05$) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden menilai bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi proyek KPBU PJU di Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan di Sijunjung, yang mencerminkan sistem pengawasan dan keterbukaan informasi yang lebih baik di Dharmasraya. Manfaat ganda yang diperoleh Menurut Bapak/ibu, seberapa besar manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak (Pemerintah dan Badan

Usaha/swasta) dapat mempengaruhi keberhasilan proyek KPBU PJU?. Selanjutnya hasil paired t-test menganalisa manfaat ganda disajikan pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil Paired t-test Menganalisa Manfaat Ganda

Variabel	N	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x12d	30	4.333	0.11072	0.606	[4.106871, 4.559796]	
	333	73	4784			
x12s	30	3.866	0.14169	0.776	[3.576874, 4.156459]	
	667	2	0792			
Diff	30	0.466	0.17768	0.973	[0.1032662, 0.8300671]	0.0136
	667	2	2042			136

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap manfaat yang diterima oleh Pemerintah dan Badan Usaha dalam mendukung keberhasilan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 4,33 (CI 95%: 4,11–4,56), lebih tinggi dibandingkan Sijunjung dengan skor 3,87 (CI 95%: 3,58–4,16), dan selisih rata-rata sebesar 0,47 (CI 95%: 0,10–0,83). Nilai t sebesar 2,6264 dan p-value 0,0136 ($< 0,05$) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden menilai bahwa manfaat proyek KPBU PJU lebih besar dirasakan di Dharmasraya, yang mengindikasikan bahwa manfaat proyek di daerah tersebut lebih jelas, terdistribusi lebih baik, atau lebih dirasakan oleh para pemangku kepentingan dibandingkan di Sijunjung. Efisiensi Lampu PJU (Menurut Bapak/ibu, apakah efisiensi lampu proyek KPBU yang telah ditentukan mempengaruhi sukses KPBU PJU di daerah Bapak/ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test efisiensi lampu pju disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Hasil Paired t-test Efisiensi Lampu PJU

Variabel	N	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x13d	30	4.266	0.13504	0.739	[3.990466, 4.542868]	
	667	65	68			
x13s	30	3.866	0.15708	0.860	[3.545401, 4.187933]	
	667	06	3661			
diff	30	0.400	0.21226	1.162	[-0.0341357, 0.8341357]	0.0696
	667	75	637			6

Hasil paired t-test menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam persepsi responden mengenai pengaruh efisiensi lampu terhadap keberhasilan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 4,27 (CI 95%: 3,99–4,54) dan di Sijunjung 3,87 (CI 95%: 3,55–4,19), dengan selisih rata-rata 0,40 (CI 95%: -0,03–0,83). Nilai t sebesar 1,8844 dan p-value 0,0696 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Meskipun responden di Dharmasraya cenderung memberikan penilaian lebih tinggi, perbedaan ini belum cukup kuat untuk disimpulkan secara definitif. Dukungan dari pulik (Bagaimana menurut Bapak/ibu, dukungan dari publik (masyarakat), terhadap pelaksanaan program/kegiatan KPBU PJU di daerah Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil

paired t-test dukungan dari publik disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Hasil paired t-test Dukungan dari publik

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x14d	30	4.400 000	0.1231 764	0.6746 647	[4.148076, 4.651924]	
x14s	30	3.533 333	0.1776 682	0.9732 042	[3.169933, 3.896734]	
diff	30	0.866 667	0.2183 182	1.1957 78	[0.4201558, 1.313178]	0.04 4

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap dukungan publik terhadap pelaksanaan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 4,40 (CI 95%: 4,15–4,65) dan di Sijunjung 3,53 (CI 95%: 3,17–3,90), dengan selisih rata-rata sebesar 0,87 (CI 95%: 0,42–1,31). Nilai t sebesar 3,9697 dan p-value 0,0004 (< 0,05) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan publik terhadap proyek KPBU PJU secara signifikan lebih tinggi di Dharmasraya dibandingkan Sijunjung, yang mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam tingkat sosialisasi, manfaat yang dirasakan, atau keterlibatan masyarakat dalam proyek. Budaya masyarakat negara yang pro investasi (Menurut bapak/ibu, apakah budaya masyarakat di daerah bapak/ibu mendukung adanya investasi proyek KPBU PJU?). Selanjutnya hasil paired t-test budaya masyarakat negara yang pro investasi disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil Paired t-test Budaya Masyarakat Negara yang Pro Investasi

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-Value
x15d	30	3.966 667	0.1311 605	0.71 8395 4	[3.698413, 4.234922]	
x15s	30	3.566 667	0.1329 016	0.72 7932	[3.294852, 3.838481]	
diff	30	0.400 000	0.1406 062	0.032 1	[0.1124279, 0.6875721]	0.00 81

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden terhadap dukungan budaya masyarakat terhadap investasi proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 3,97 (CI 95%: 3,70–4,23) dan di Sijunjung 3,57 (CI 95%: 3,29–3,84), dengan selisih rata-rata 0,40 (CI 95%: 0,11–0,69). Nilai t sebesar 2,8448 dan p-value 0,0081 (< 0,05) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat di Dharmasraya lebih mendukung investasi proyek KPBU PJU dibandingkan di Sijunjung, yang dapat disebabkan oleh tingkat penerimaan, pemahaman terhadap skema KPBU, atau faktor sosial lainnya. Perjanjian kerjasama yang jelas Bagaimana (menurut Bapak/ibu, bentuk perjanjian kerjasama terkait KPBU

untuk membantu kesuksesan/keberhasilan proyek KPBU PJU di Kabupaten Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test peraturan kerjasama yang jelas disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15. Hasil Paired t-test Peraturan Kerjasama yang Jelas

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x16d	30	4.200 000	0.1304 281	0.7143 842	[3.933245, 4.466755]	
x16s	30	3.800 000	0.1688 365	0.9247 553	[3.454691, 4.145309]	
diff	30	0.400 000	0.2176 151	1.1919 27	[-0.0450728, 0.8450728]	0.0 76 3

Hasil paired t-test menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden mengenai bentuk perjanjian kerja sama KPBU dalam mendukung keberhasilan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 4,20 (CI 95%: 3,93–4,47) dan di Sijunjung 3,80 (CI 95%: 3,45–4,15), dengan selisih rata-rata 0,40 (CI 95%: -0,05–0,85). Nilai t sebesar 1,8381 dan p-value 0,0763 (> 0,05) menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi responden terhadap bentuk perjanjian kerja sama KPBU relatif sama di kedua daerah. Konsorsium yang kuat (Apakah konsorsium/pihak swasta yang menjadi pemrakarsa dapat mempengaruhi keberhasilan proyek KPBU PJU di daerah Bapak/Ibu?). Selanjutnya hasil paired t-test konsorsium yang kuat disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil Paired t-test Konsorsium yang Kuat

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x17d	30	4.233 333	0.132 9016	0.7279 32	[3.961519, 4.505148]	
x17s	30	3.666 667	0.199 6165	1.0933 45	[3.258405, 4.074928]	
diff	30	0.566 667	0.242 9859	1.3308 89	[0.0697047 , 1.063629]	0.026 8

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden mengenai pengaruh konsorsium atau pihak swasta sebagai pemrakarsa terhadap keberhasilan proyek KPBU PJU di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 4,23 (CI 95%: 3,96–4,51) dan di Sijunjung 3,67 (CI 95%: 3,26–4,07), dengan selisih rata-rata 0,57 (CI 95%: 0,07–1,06). Nilai t sebesar 2,3321 dan p-value 0,0268 (< 0,05) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden di Dharmasraya cenderung menilai bahwa konsorsium atau pihak swasta sebagai pemrakarsa memiliki pengaruh lebih besar terhadap keberhasilan proyek KPBU PJU dibandingkan di Sijunjung, yang dapat mencerminkan perbedaan efektivitas peran pihak swasta dalam keterlibatan, manajemen, maupun regulasi di masing-masing daerah. Pembagian alokasi risiko (Menurut Bapak/Ibu, apakah pembagian dan alokasi risiko proyek KPBU

PJU antara pemerintah daerah dengan pihak swasta/pemrakarsa berimbang?). Selanjutnya hasil paired t-test pembagian alokasi risiko disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Paired t-test Pembagian Alokasi Risiko

Variabel	N	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x18d	30	3.9	0.13 8547 5	0.75 8855 8	[3.616639, 4.183361]	
x18s	30	3.3	0.17 3867 4	0.95 2311 2	[2.944401, 3.655599]	
diff	30	0.6	0.24 7284 1	1.35 4431	[0.0942472 , 1.105753]	0.0217

Hasil paired t-test menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi responden mengenai keseimbangan pembagian dan alokasi risiko proyek KPBU PJU antara pemerintah daerah dan pihak swasta di Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 3,9 (CI 95%: 3,62–4,18) dan di Sijunjung 3,3 (CI 95%: 2,94–3,66), dengan selisih rata-rata 0,6 (CI 95%: 0,09–1,11). Nilai t sebesar 2,4264 dan p-value 0,0217 (< 0,05) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden di Dharmasraya menilai pembagian dan alokasi risiko lebih seimbang dibandingkan di Sijunjung, yang mengindikasikan perbedaan mekanisme pengelolaan risiko, termasuk regulasi, pengalaman pemerintah daerah, dan keterlibatan pihak swasta dalam mengelola risiko proyek. Adanya jaminan pemerintah selama pelaksanaan KPBU (Bagaimana menurut Bapak/Ibu, jaminan kemampuan pembayaran ketersediaan layanan/Available Payment (AP) proyek KPBU PJU yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemrakarsa/pihak ke-3?). Selanjutnya hasil paired t-test pengetahuan dan pengalaman tim pemerintah disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18. Hasil Paired t-test Pengetahuan dan Pengalaman Tim Pemerintah

Variabel	n	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	95% Confidence Interval	P-value
x20d	30	3.733 333	0.1262 486	0.6914 918	[3.475126, 3.991541]	
x20s	30	3.066 667	0.1724 291	0.9444 332	[2.71401, 3.419324]	
diff	30	0.666 667	0.2052 939	1.1244 41	[0.2467935 , 1.086540]	0.0029

Hasil paired t-test menunjukkan perbedaan signifikan dalam persepsi mengenai pengetahuan, keahlian, dan pemahaman tim pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek KPBU PJU antara Dharmasraya dan Sijunjung. Rata-rata skor di Dharmasraya adalah 3,73 (CI 95%: 3,48–3,99) dan di Sijunjung 3,07 (CI 95%: 2,71–3,42), dengan selisih rata-rata 0,67 (CI 95%: 0,25–1,09). Nilai t sebesar 3,2474 dan p-value 0,0029 (< 0,05) menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan demikian, responden di Dharmasraya menilai tim pemerintah daerah lebih berpengetahuan,

ahli, dan memahami proyek KPBU PJU dibandingkan di Sijunjung, yang dapat disebabkan oleh pengalaman, pelatihan, atau dukungan kebijakan yang lebih baik.

Rata-rata skor keseluruhan KPBU PJU Kabupaten Dharmasraya mencapai 4,14 dari skala 5, menandakan kinerja proyek yang baik. Faktor dengan skor tertinggi adalah dukungan publik (mean 4,4; SD 0,6747), mencerminkan tingginya dan konsistennya persepsi responden. Hal ini didukung oleh pelaksanaan dua kali konsultasi publik yang melibatkan Bupati, DPRD, Forkopimda, serta pemangku kepentingan lainnya, sesuai amanat Pasal 23 Perpres No. 38 Tahun 2015 mengenai keharusan konsultasi publik dalam identifikasi proyek KPBU.

Sementara itu, faktor dengan skor terendah adalah pengetahuan dan pengalaman (mean 3,733; SD 0,6915), menunjukkan bahwa responden menilai faktor ini kurang berpengaruh terhadap keberhasilan proyek. Hal ini dapat dimaklumi karena proses KPBU didampingi oleh kementerian, lembaga, serta konsultan profesional yang berpengalaman. Secara umum, nilai standar deviasi tiap faktor berkisar antara 0,5571 hingga 0,8030, menandakan persepsi responden yang cukup seragam terhadap keberhasilan pelaksanaan KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya.

Rata-rata skor keseluruhan faktor penentu keberhasilan KPBU PJU di Kabupaten Sijunjung adalah 3,621, lebih rendah dibandingkan Dharmasraya (4,14), yang menunjukkan bahwa kinerja KPBU PJU di Sijunjung belum sebaik Dharmasraya. Faktor dengan skor tertinggi adalah kerangka kerja pemantauan dan evaluasi proyek (mean 4,2), yang mencerminkan pentingnya panduan yang jelas dalam mengawal keberhasilan proyek menurut persepsi responden. Sebaliknya, faktor dengan skor terendah (mean 3,033) adalah pengetahuan dan pengalaman serta komitmen pemerintah daerah. Minimnya pengalaman dan belum adanya daerah sekitar yang menerapkan KPBU menjadi tantangan tersendiri, sehingga konsultasi harus dilakukan ke luar Sumatera Barat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam hal pendanaan perencanaan KPBU sangat dibutuhkan. Standar deviasi yang lebih tinggi dan bervariasi (0,6644–1,0933) menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap faktor-faktor keberhasilan cukup beragam dan tidak seragam.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Sijunjung, khususnya dari sisi implementasi administrasi dan teknis. Dukungan serta penerimaan dari pemangku kepentingan terhadap proyek KPBU PJU di Kabupaten Dharmasraya juga lebih menonjol, sedangkan di Kabupaten Sijunjung faktor-faktor penentu keberhasilan proyek menunjukkan kualitas pelaksanaan yang kurang konsisten dan lebih bervariasi dari para responden. Secara khusus,

Kabupaten Dharmasraya memperlihatkan performa pelaksanaan program KPBPU PJU yang lebih baik dan konsisten. Kajian lingkungan dan sosial, terutama dukungan publik, menjadi faktor penentu keberhasilan yang paling menonjol di wilayah ini. Keterlibatan pemangku kepentingan sesuai kewenangannya sangat berpengaruh dalam keberhasilan proyek tersebut. Namun demikian, faktor pengalaman dan pengetahuan menjadi aspek terlemah, yang wajar mengingat proyek KPBPU PJU masih relatif baru dan Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten pertama yang berhasil mencapai tahap pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment). Tim KPBPU di daerah ini pada awalnya belum memiliki referensi atau studi tiru, sehingga mendapat banyak pendampingan dari berbagai lembaga seperti Bappenas, LKPP, konsultan profesional, dan akademisi. Selain itu, komitmen pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terutama dalam hal penganggaran dan perencanaan, sangat penting untuk mendukung proses pelaksanaan KPBPU, termasuk dalam hal konsultasi, koordinasi, dan pendampingan yang memerlukan anggaran memadai.

Sementara itu, di Kabupaten Sijunjung, faktor penentu keberhasilan KPBPU PJU lebih menekankan pada kajian teknis seperti kerangka kerja yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi proyek. Hal ini berbeda dengan fokus Kabupaten Dharmasraya yang lebih menitikberatkan pada kajian sosial berupa dukungan dari pemangku kepentingan. Faktor yang paling lemah di Sijunjung adalah komitmen pemerintah daerah, khususnya terkait perencanaan dan penganggaran, yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, dukungan pemangku kepentingan di Sijunjung kurang kuat dibandingkan dengan Dharmasraya.

Daftar Rujukan

- [1] Amelia, E. B. (2023). Faktor-Faktor Kritis Penentu Kesuksesan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBPU) Sektor Air Minum. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 19(1), 57–72. DOI: <https://doi.org/10.33658/jl.v19i1.317> .
- [2] Leonard, A. E., Parulian, R. T., & T. Saphira, R. L. (2020). Triangulasi Konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBPU) untuk Menjembatani Kesenjangan Keterampilan di Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Sentris*, 1(1), 62–74. DOI: <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4194.62-74> .
- [3] Maulana, M. R. (2021). Pemahaman dan Pembelajaran Tahap Perencanaan dan Penyiapan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBPU). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(1). DOI: <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1646> .
- [4] Yescombe, E. R., & Farquharson, E. (2018). Public-Private Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy and Finance. *Public-Private Partnerships for Infrastructure: Principles of Policy and Finance* (pp. 1–531). Elsevier. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-100766-2.00029-2> .
- [5] Grimsey, D., & Lewis, M. K. (2002). Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects. *International Journal of Project Management*, 20(2), 107–118. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0263-7863\(00\)00040-5](https://doi.org/10.1016/S0263-7863(00)00040-5) .
- [6] Hwang, B. G., Zhao, X., & Gay, M. J. S. (2013). Public Private Partnership Projects in Singapore: Factors, Critical Risks and Preferred Risk Allocation from the Perspective of Contractors. *International Journal of Project Management*, 31(3), 424–433. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.08.003> .
- [7] Firmansyah, M. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dalam Penentuan Basis Ekonomi, Isu Ketimpangan dan Lingkungan di Jawa Barat Periode 2010-2019. *Jambura Economic Education Journal*, 3(1), 8–27. DOI: <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i1.8292> .
- [8] Nawawi, A. (2021). Arah Kebijakan Perlindungan Sosial ke Depan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1824–1838. DOI: <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i10.329> .
- [9] Samuelson, P. A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure. *The Review of Economics and Statistics*, 36(4), 387. DOI: <https://doi.org/10.2307/1925895> .
- [10] Hodge, G. A., & Greve, C. (2007). Public-Private Partnerships: An International Performance Review. *Public Administration Review*, 67(3), 545–558. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00736.x> .
- [11] Meade, J. E., Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1963). The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. *The Economic Journal*, 73(289), 101. DOI: <https://doi.org/10.2307/2228407> .
- [12] Maimunah, M., & Imron Rosadi, K. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Sistem Manajemen Lembaga Pendidikan Islam dalam Kebijakan Politik Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 249–265. DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.446> .
- [13] Arrow, K. J. (2017). Social Choice and Individual Values. In *Modern Economic Classics-Evaluations Through Time* (pp. 154–165). Taylor and Francis. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315270548-14> .
- [14] Abell, P., North, D. C., Alt, J. E., & Shepsle, K. A. (1992). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. *The British Journal of Sociology*, 43(2), 299. DOI: <https://doi.org/10.2307/591470> .
- [15] Gottschalk, P. (2000). Information systems executives: The changing role of new IS/IT leaders. *Informing Science*, 3(2), 31–39. DOI: <https://doi.org/10.28945/573> .
- [16] Chileshe, N., Njau, C. W., Kibichii, B. K., Macharia, L. N., & Kavische, N. (2022). Critical success factors for Public-Private Partnership (PPP) infrastructure and housing projects in Kenya. *International Journal of Construction Management*, 22(9), 1606–1617. DOI: <https://doi.org/10.1080/15623599.2020.1736835> .
- [17] Ramdan Yusuf, & Restu Auliani. (2023). Peran Perencanaan Kota Berkelanjutan dalam Mengatasi Krisis Air Perkotaan: Integrasi Infrastruktur Hijau, Teknologi Pemanfaatan, dan Kebijakan Publik. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(09), 770–779. DOI: <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i09.628> .
- [18] Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif dengan Pendekatan Kualitatif dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen dan Wirausaha*, 4(2), 123–136. DOI: <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136> .
- [19] Sari, M., Rachman, H., Juli Astuti, N., Win Afgani, M., & Abdullah Siroj, R. (2022). Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(01), 10–16. DOI: <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953> .
- [20] Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris : Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 15(2), 164–172. DOI: <https://doi.org/10.32534/jv.v15i2.1291> .
- [21] Kandiyoh, G. E., Sengkey, S., Runtunuwu, S., & Tenda, J. (2022). Analisis Faktor Konfirmatori untuk Menentukan faktor-faktor penentu Keberhasilan Kerjasama Pemerintah Badan

- Usaha Jalan Tol Manado-Bitung. *Jurnal Teknik Sipil Terapan*, 4(1), 29. DOI: <https://doi.org/10.47600/jtst.v4i1.317>
- [22] Irawan, T. T. (2016). Kajian Potensi dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial dengan Skema KBPU. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 1(2), 105–120. DOI: <https://doi.org/10.36226/jrmb.v1i2.15> .
- [23] Lexy J. Moleong, Dr. M. A. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055> .
- [24] Aswanto, A., & Wibowo, A. (2022). Eksplorasi Interdependensi Faktor - Faktor Risiko pada Proyek KPBU Jalan Tol menggunakan Interpretive Structural Modeling. *Jurnal Teknik Sipil*, 29(3). DOI: <https://doi.org/10.5614/jts.2022.29.3.11> .